

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA GUNA MENYAMBUT PILKADA
SERENTAK 2024 DI KABUPATEN JOMBANG**

Faizin Iwan Ariyanto

NPP. 30.0798

Asdaf Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: faiziniwanariyanto@mail.com

Pembimbing Skripsi: Bagus Wahyu Hartono, S.STP, M.A, Ph. D

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Beginner voters in participating in politics in Jombang Regency have not met the expectations of the Jombang Regency Kesbangpol Agency, so beginner voters need the role of the Jombang Regency Kesbangpol Agency in providing political education..

Purpose: This study aims describe and analyze the role of the Kesbangpol Agency in the implementation of political education for first time voters, the supporting and inhibiting factors and the efforts made to overcome the inhibiting factors. **Method:** The theory used is the Role Theory by Bidle and Thomas, which has 4 dimensions, namely expectations, norms, performance, evaluation and sanctions. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques were carried out using data reduction, data presentation, submission and verification, final conclusions. **Result:** The role of the Jombang Regency Kesbangpol Agency in carrying out political education for first-time voters to welcome the 2024 simultaneous regional elections in Jombang Regency has been carried out. Namely by providing political education in the form of political seminars at the Jombang Regency Hall. However, there are deficiencies in its implementation, such as the political education method carried out by the Jombang Regency Kesbangpol Agency, which does not attract young voters to participate in political education

Conclusion: The role of the Kesbangpol Agency in organizing political education for first-time voters to welcome the 2024 simultaneous Pilkada in Jombang Regency has not been maximized as seen from the disinterest of first-time voters in the method of political socialization that has been carried out by the Jombang Regency Kesbangpol Agency.

Keywords: Role, Election, National Unity and Politics Agency, First-time voters Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilih pemula dalam melakukan partisipasi politik di Kabupaten Jombang belum memenuhi harapan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang, sehingga pemilih pemula perlu peran Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dalam pemberian pendidikan politik.. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula, faktor pendukung dan

penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Teori yang digunakan adalah Teori Peran oleh Bidle dan Thomas, dimana memiliki 4 dimensi yaitu harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penyampaian dan verifikasi, kesimpulan akhir. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan. Yaitu dengan pemberian pendidikan politik berupa seminar politik di Pendopo Kabupaten Jombang. Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti metode pendidikan politik yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang kurang menarik minat pemilih pemula untuk mengikuti pendidikan politik. **Kesimpulan:** Peran Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang belum maksimal sebagaimana terlihat dari tidak tertariknya pemilih pemula terhadap metode sosialisasi politik yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang..

Kata kunci: Peran, Pilkada, Badan Kesbangpol, Pemilih pemula.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada secara serentak merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Maka dari itu, masyarakat diharapkan memberikan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada dengan memberikan hak suaranya.

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara langsung. Undang-Undang telah menetapkan bagaimana sistematis pemilihan kepala daerah yang dijalankan oleh negara Indonesia, sehingga sejak tahun 2005 pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa semakin kuat sistem demokrasi yang di bentuk oleh sebuah negara.

Pesta demokrasi melalui Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan karena tenggat waktu yang dilaksanakan secara bersamaan, tentu dampak lain yang dapat dirasakan secara langsung adalah penghematan anggaran negara.

Adapun dukungan dari pemerintah terhadap Pilkada tahun 2024 dengan memberikan pendidikan politik dengan tujuan untuk menciptakan jiwa politik kepada setiap individu berupa keyakinan konsep, pengetahuan dan wawasan politik sehingga mampu menciptakan kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Apabila dihubungkan dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik atau biasa di singkat Badan Kesbangpol dalam memberikan pemahaman pendidikan politik dan memiliki tujuan agar masyarakat sadar pentingnya politik serta diharapkan mampu menjadi aktor politik itu sendiri. Berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat terutama anak muda terhadap hal yang berhubungan dengan politik masih rendah dibuktikan dengan pemilih pemula ketika melaksanakan pemilihan umum banyak pemilih pemula kurang mengenal pasangan calon kepala daerah ataupun kandidat partai yang diusung. Pemilih pemula hanya memilih kandidat yang memberikan bantuan sebelum pemilu. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat menimbulkan partisipasi politik yang bersifat praktis.

Salah satu daerah yang juga menjalankan sistem Pilkada serentak 2024 adalah Kabupaten Jombang. Kabupaten tersebut memiliki sebutan kota santri dengan jumlah 115 pondok pesantren dan 198

Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan. Banyaknya lembaga pendidikan yang terdapat di Kabupaten Jombang berbanding lurus dengan generasi muda pada tahun 2019 Kabupaten Jombang menghasilkan 16.682 pemilih pemula yang dimilikinya. Namun, pemilih pemula berpotensi gagal menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah serentak yang digelar dibulan April 2019 karena KPU belum memiliki regulasi baru yang membolehkan pemilih datang untuk mencoblos ke TPS, meski tidak membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL). Sehingga, “KPU masih menggunakan aturan di mana setiap pemilih wajib memiliki dan menunjukkan KTP-EL pada saat menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut berdampak kepada pemilih pemula yang kesulitan menggunakan hak suaranya karena belum memiliki KTP-EL.

Maka melalui sosialisasi pendidikan politik harapannya proses demokrasi di Kabupaten Jombang semakin sehat dan menggerakkan pemilih pemula untuk berpartisipasi lebih aktif dalam Pilkada serentak. Kurangnya pemahaman politik dan keterbatasan informasi bagi pemilih pemula Pemilih terhadap Pilkada serentak 2024 mengenai pasangan calon, menyebabkan partisipasi pemilih pemula menurun dalam Pilkada. Tentu hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Jombang ke depannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Jombang memiliki persentase mencapai 13% yang apabila tidak diperhatikan secara khusus akan rentan tidak berpartisipasi dalam politik. Sehingga, angka partisipasi dalam politik pemilih pemula cenderung menurun. Pemilih pemula kebanyakan masih bingung dan tidak mengerti calon-calon yang akan menjadi kepala daerah sehingga memiliki kecenderungan bersikap apatis terhadap Pilkada. Padahal, pemilih pemula merupakan penerus di masa depan yang cenderung untuk terus berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. (KPU, 2022)

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Kesbangpol melakukan upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi di kalangan pemilih pemula dengan cara melakukan pendekatan di bidang pendidikan melalui sosialisasi dan pendidikan politik dalam bentuk pengenalan bakal calon kepala daerah, program kerja, dan waktu pelaksanaan Pilkada kepada para pemilih pemula untuk menambahkan wawasan. Peningkatan kualitas masyarakat melalui generasi muda diharapkan tingkat partisipasi pemilih pemula tercapai seratus persen atau setidaknya dapat meningkatkan kualitas. Politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu sebagai media untuk belajar dalam penerapan demokrasi yang dijalankan setiap pergantian kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang menyatakan Meskipun jumlah pemilih pemula Kabupaten Jombang pada tahun 2019 hanya 16.682 jiwa tetap tidak bisa diabaikan. “Karena jika awal yang baik diterima oleh pemilih pemula akan berlanjut sampai kedepannya. Oleh karena itu KPU melalui Badan Kesbangpol melakukan tindakan peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik di Kabupaten Jombang”, (Audiansyah, 2019).

Adapun jumlah pemilih pemula dan partisipasi politik di Kabupaten Jombang penulis sajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 Jumlah Pemilih Pemula Dan Partisipasi Pemilih Pemula Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jumlah Pemilih Pemula	Jumlah Pemilih Pemula Yang Memilih	Jumlah Pemilih Pemula Yang Tidak Memilih	Persentase pemilih
2018	14.131	9.467	4.664	67 %
2019	16.682	10.342	6.339	63 %

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah pemilih pemula mengalami kenaikan. Namun, mengalami penurunan secara presentase dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari data menunjukkan bahwa pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya mengalami kenaikan yakni sebesar 683 jiwa dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, presentase jumlah pemilih mengalami penurunan sebesar 4%. Hal tersebut perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan politik	Sumber daya manusia yang tidak memadai menyebabkan sasaran pendidikan politik tidak terpenuhi	Lemahnya kinerja organisasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan organisasi
2.	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan harmonisasi antar lapisan masyarakat	Masih lemahnya penanaman nilai-nilai ideologi bangsa	Masih rendahnya masyarakat tentang toleransi, solidaritas dan kerukunan
3.	Lemahnya peran serta masyarakat terutama generasi muda dalam menuangkan aspirasi melalui demokrasi yang disediakan	Masih lemahnya koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan	Rendahnya pendidikan politik dan pengembangan karakter dalam budaya politik

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang 2019-2023

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel 2 menunjukkan bahwa generasi muda di Kabupaten Jombang masih rendah dalam menuangkan aspirasi demokrasi melalui partisipasi politik. Generasi muda memiliki jiwa semangat yang tinggi. Namun, tingkat keterlibatan dalam mendukung pemerintah menciptakan dinamika politik yang stabil tergolong masih kurang. Hal tersebut berdampak kepada partisipasi politik pemilih pemula yang tidak sesuai dengan harapan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Iko Deswanda berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*, menemukan bahwa Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan Pendidikan politik belum maksimal, terdapat kendala dalam proses penyelenggaraan. Pendidikan politik yang di selenggarakan dirasa kurang memuaskan dikarenakan penyusunan renstra yang membelenggu, anggaran yang tidak memadai, tidak adanya silabus untuk metode yang digunakan, namun Badan Kesbangpol telah menemukan solusi mengenai hambatan tersebut dengan cara memaksimalkan penyelenggaraan Pendidikan politik (Kristian, 2021)

Penelitian Joni Firmansyah berjudul *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Tengah Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020*, menemukan bahwa Pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa lebih terkoordinasi dalam Pemilu yang akan datang di Kabupaten Sumbawa didominasi pemilih sosiologis di Kabupaten Sumbawa yang cenderung tinggi sehingga terbentuklah lingkungan pemilihan terikat. Pendidikan politik secara langsung berperan penting meskipun adanya beberapa

hambatan dan tantangan apalagi pada masa pandemi covid-19 yang terjadi. Apabila pemilu belum bisa dilenggarakan secara langsung di tempat pemungutan suara setempat masih terdapat beberapa upaya lain yang digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik sebagai modal awal dalam pemilu (Firmansyah, 2021)

Penelitian Irlan Haerul berjudul *Peranan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di MA AL-Muthmainnah*, menemukan bahwa Pendidikan politik melalui pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa MA AL-Muthmainnah (Haerul, 2019)

Penelitian Yogi Gumilar S.A berjudul *Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula*, menemukan bahwa pengembangan model partisipasi pemilih pemula untuk pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, pengembang yang dilakukan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan pemilih pemula untuk turut serta berpartisipasi politik, (Yogi, 2019)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan melihat bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jombang, yang kemudian hasilnya dapat menjadi acuan perbaikan untuk Pilkada Kabupaten Jombang ke depannya. Pengukuran/indicator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan pendapat dari Biddle dan Thomas dimana terdapat 4 dimensi yaitu harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan hambatan Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan Teori Biddle dan Thomas sebagai indikator penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 24 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang, Kepala Bidang Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang, Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Politik (3 orang), Anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang (3 orang), Anggota Karang Taruna Kabupaten Jombang (3 orang), dan Pemilih Pemula di Kabupaten Jombang (11 orang). Adapun analisisnya menggunakan empat tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh peneliti pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan terkait. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori Biddle and Thomas Sarwono (2013:215) yang berkaitan dengan expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Dalam hal ini Badan

Kesbangpol Kabupaten Jombang dilihat dari bagaimana pelaksanaannya yang berdasarkan aturan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Badan Kesbangpol dalam Program Pendidikan Politik Pemilih Pemula

a. Expectation (Harapan)

Penulis melakukan pengukuran terhadap eksistensi dan terwujudnya harapan sesuai dengan peran Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang melalui wawancara dengan informan terkait.

Penulis mengambil kesimpulan terhadap wawancara terhadap Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dan empat orang pemilih pemula di Jombang bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan sebagaimana mestinya namun, masih belum menjangkau ke seluruh kalangan pemilih pemula. Selain frekuensi yang rendah hanya 3 kali pada tahun 2021, dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan sosialisasi pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Norm (Norma)

Adanya peraturan yang jelas serta tugas, pokok, dan fungsi Badan Kesbangpol yang berjalan sebagaimana mestinya menjadi indikator/pengukuran peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan wawancara terhadap Sekretaris badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dan pemilih pemula yang mengikuti Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang telah melaksanakan pendidikan politik tanpa adanya keluhan dari para pemilih pemula sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

c. Performance (Wujud Perilaku)

Indikator ini memuat keikutsertaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada peran yang dijalankan dalam proses pendidikan politik di Kabupaten Jombang.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang serta dengan anggota Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Jombang mengatakan bahwa sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sebagai penyelenggara pendidikan politik pada tahun 2020 masih kurang maksimal karena dilakukan hanya 1 kali akibat adanya pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan yang bersifat interaksi secara kerumunan dibatasi.

Padahal pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan secara langsung melainkan dapat juga dengan memanfaatkan media sosial di kalangan pemilih pemula yang mayoritas dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari media sosial. Di samping mudah dalam mengakses informasi mengenai Pilkada Serentak 2024 pendidikan politik melalui media sosial bersifat efektif. Apalagi selama 2 tahun ini Indonesia dilanda pandemi covid-19 menyebabkan Badan Kesbangpol tidak dapat melaksanakan perannya dalam memberikan sosialisasi pendidikan politik karena keterbatasan dan larangan dari pemerintah untuk melakukan interaksi di keramaian sehingga, salah satu cara untuk tetap melaksanakan pendidikan politik di masa pandemi dengan melalui media sosial.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi menjadi indikator/pengukuran peneliti terhadap

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum serta dua orang pemilih pemula di Kabupaten Jombang mengatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Namun, Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang tidak terlibat dalam pemberian sanksi bukanlah tugas Badan Kesbangpol

Kabupaten Jombang, tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dalam menghadapi Pilkada hanya sebatas memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang paham politik dan berkualitas sebagai pemimpin dimasa depan yang memperkuat sistem pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi politik yang berintegritas untuk memperkuat demokrasi dan memastikan kepentingan masyarakat terwakili secara adil dan merata.

3.2. Faktor Penghambat Program Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Selama melaksanakan pengamatan di lapangan yang berhubungan tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Jombang, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan peran yang dijalankan tidak mudah. Terdapat hambatan pada program pendidikan politik bagi pemilih pemula, di antaranya adalah banyaknya jumlah sekolah menengah atas dan pemilih pemula di setiap wilayah di Kabupaten Jombang tidak sepadan dengan jumlah pegawai di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, hal tersebut di buktikan dengan tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Jumlah SMA Di Kabupaten Jombang

No	Nama Sekolah	No	Nama Sekolah
1	SMA Wahid Hasim 4 Gudo	26	SMAN Bandarkedungmulyo
2	SMA Wahid Hasyim perak	27	SMAN Bareng
3	SMA Wahid Hasyim Perak	28	SMAN Kabuh
4	SMA Abi Huroiroh	29	SMAN Jogoroto
5	SMA Avicenna Jombang	30	SMAN Kesamben
6	SMA Bahrul Ulum Tambak Beras	31	SMAN Mojoagung
7	SMA Budi Utomo Perak	32	SMAN Ngoro
8	SMA Darul Ulum 1 Peterongan	33	SMAN Plandaan
9	SMA Darul Ulum 2 Unggulan	34	SMAN Ploso
10	SMA Darul Ulum 3 Peterongan	35	SMA Pancasila
11	SMA Darul Ulum Tapen	36	SMA Patriot Peterongan
12	SMA Diponegoro	37	SMA Pgri 1 jombang
13	SMA Islam Mojopahit	38	SMA Pgri 2 Jombang
14	SMA Islam Ngoro	39	SMA Pgri 1 Ploso
15	SMA Islam Sunan Ampel	40	SMA Pgri Kesamben
16	SMA Kosgoro 2	41	SMA Pgri Megaluh
17	SMA Kristen YPBK Mojowarno	42	SMA Pgri Ngoro
18	SMA Madinatul Ulum Tembelang	43	SMA Pgri Perak
19	SMA Miftahul Ulum	44	SMA Pgri Peterongan
20	SMA Miftahul Ulum	45	SMA Primaganda
21	SMA Muhammadiyah 1 Jombang	46	SMA Trensains Tebuireng
22	SMA Muhammadiyah 2 Jombang	47	SMA YPM Sumobito
23	SMAN 1 Jombang	-	-
24	SMAN 2 Jombang	-	-
25	SMAN 3 Jombang	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2021

Tabel 4. Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol

No.	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Anwar, M.KP 19710418 19920201 1 004	Kepala Badan
2	Samsul Huda, S.Sos,M.Si 19869515 199202 1 001	Sekretaris
3	Yuni Sulistyorini ,S.Sos 19810612 200501 2 012	Perencana Ahli
4	Eeng Mibakhuddin, SE 19900912 201505 1 001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

5	Ery Indra Tjahjaningsih,SH 19710402 199903 2 003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	Sosi Andrijani 19750310 200901 2 002	Pengelola Kepegawaian
7	Wahyudi Eko Sudrajat 19780509 200901 1 004	Pengadministrasian Umum
8	Titis Puspitorini, S.AP 19780509 200901 1 004	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
9	Eni Fatmawati, S.Sos 19891201 201505 2 002	Penata Laporan Keuangan
10	Yulia Nuryanti, A.Md 19970705 202012 2 007	Pengadministrasi Keuangan
11	Ashari S, KM, M.KP 19680205198903100	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
12	Hadi Kushartanto 19670712199202 1 002	Analisis Kebijakan Ahli
13	Arfan Budi S, SE, M.KP 197610061997031000	Kabid Ideologi , Wasbang, dan Ketahanan ekonomi, Sosbud, Agama
14	Sudarmadji Triono, SH 19700520 199603 1 014	Analisis Kebijakan Ahli Muda
15	Diana Prihatiana,SH 19650509199401 2 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda
16	Tony Prasetyo W, ST, M.Si 19641215 199302 1 001	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
17	Kaniran, SH 19690605 199302 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda
18	Katono Sugiarto,SH,M.Si 19710608200701 2 015	Analisis Kebijakan Ahli Muda
19	Kartika Juniati Pratiwi, SE 197106082007012015	Pelaksana
20	Zumrotul Ulfa, S.Sos 19751 102 200701 2 010	Pelaksana
21	Fifin Rahmawati	Honoror
22	Priyo Sulistiyo	Honoror
23	Dwi Mas Putranto	Honoror
24	Lindu	Honoror

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang

Kurangnya minat pemilih pemula dalam mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang, kemudian kurangnya aparatur yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang membuat penyelenggaraan pendidikan politik belum bisa maksimal. Peningkatan partisipasi politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jombang bukan hanya kepada pemilih pemula, melainkan juga dengan biasa dilakukan kepada masyarakat umum, komunitas, partai politik, penyandang disabilitas dan sebagainya. Keterbatasan aparatur Badan Kesbangpol hanya berjumlah 24 orang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal, ditambah frekuensi pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang terbatas karena dampak dari pandemi covid-19 hal tersebut dapat dilihat tabel 5.

Tabel 5 Program Pendidikan Politik

Tahun	Frekuensi	Target Sosialisasi	Tujuan
2019	6	Masyarakat	Memberikan pemahaman politik menghadapi pemilu 2019
2020	1	Masyarakat	Pemberian pendidikan politik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara
2021	3	Masyarakat	Memberikan Sosialisasi menyambut Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2023

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Dari analisis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sosialisasi politik di Kabupaten Jombang memiliki beberapa kendala dan hambatan seperti dampak dari pandemi covid-19 menyebabkan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 secara drastis karena adanya pembatasan dan menghindari kerumunan, serta kurangnya aparatur di Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih keras dan terintegrasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah nantinya pada tahun 2024.

3.3. Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang

Dari Hasil pengamatan penulis, didapati bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang pada tahun 2022 telah dilaksanakan pendidikan politik sebanyak 3 kali seperti pada tabel 6.

Tabel 6 Pendidikan Politik Tahun 2022

No	Waktu	Tempat	Sasaran	Tujuan
1.	29 Oktober 2022	Green Red Hotel Syariah Kabupaten Jombang	Masyarakat Kabupaten Jombang	Mencegah terjadinya konflik yang berhubungan dengan Pemilu
2.	19 September 2022	Pendopo Kabupaten Jombang	Pemilih pemula, generasi millennial	Meningkatkan ketertarikan dan kepedulian generasi muda untuk terlibat partisipasi politik
3.	22 Desember 2022	Ruang Bung Tomo Gedung Pemerintah Kabupaten Jombang	Perangkat Kecamatan	Memberikan wawasan mengenai aplikasi Kesbangpol <i>smart</i> untuk memberikan pemahaman politik melalui digital service dari Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang.

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang berusaha melakukan peningkatan sosialisasi politik secara signifikan dan merata di SMA Kabupaten Jombang. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kendala dalam sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Jombang dapat teratasi dan pemilih pemula dapat aktif terlibat dalam partisipasi politik di daerah tersebut..

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan Pendidikan politik bagi pemilih pemula memberikan dampak positif terhadap tingkat pengetahuan politik pemilih pemula. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang yakni berusaha melakukan peningkatan sosialisasi politik secara signifikan dan merata di SMA Kabupaten Jombang. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kendala dalam sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Jombang dapat teratasi dan pemilih pemula dapat aktif terlibat dalam partisipasi politik di daerah tersebut. Peneliti menemukan temuan penting yakni pemilih pemula berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah setempat dengan pihak sekolah serta komunitas pemuda di Kabupaten Jombang.

Namun, tak bisa dipungkiri, Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan program Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih terdapat hambatan, diantaranya adalah kurangnya minat pemilih pemula dengan metode pendidikan politik yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang; Kurangnya sumber daya manusia (pegawai) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dan kurangnya kemampuan pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dalam menghadapi perubahan zaman terutama di dalam bidang teknologi digital; Pemberian pendidikan politik hanya terpusat pada kota dan kurang menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Jombang.

Dari hambatan – hambatan tersebut, diharapkan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dapat melakukan inovasi dalam penentuan metode sosialisasi bagi pemilih pemula dengan memanfaatkan

media sosial seperti tik tok, instagram, dan facebook, selain juga memanfaatkan media konvensional seperti ludruk dan festival musik. Selain itu, diharapkan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang juga dapat meningkatkan diklat pemanfaatan teknologi digital bagi pegawai Badan Kesbangpol, memperluas sasaran sosialisasi untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih pemula, dan peningkatan fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan politik di daerah terpencil.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang belum maksimal sebagaimana terlihat dari tidak terariknya pemilih pemula terhadap metode sosialisasi politik yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang. Selain itu, hal yang menjadi hambatan peran Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula yakni banyaknya pegawai Badan Kesbangpol yang belum terampil memanfaatkan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi politik, tidak tepatnya persepsi pemilih pemula mengenai relevansi politik dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya kemampuan Badan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di daerah terpencil.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta penelitian yang hanya dilakukan di satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih sesuai dengan teori yang digunakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan Pendidikan politik bagi pemilih pemula Kabupaten Jombang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam serta dapat melihat perkembangan ke depannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ashariadi, I., 2020. "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–26. <http://eprints.ipdn.ac.id/6207/>.
- Firmansyah, J., 2021. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(4): 2598–9944. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2534>.
- Haerul, I., 2019. "Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di Ma Al-Muthmainnah." *Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan* 9(1). <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/571>.
- Sarwono, Wirawan sarlito. 2013. *Teori-teori psikologi sosial*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yogi, G., 2019. "Model partisipasi masyarakat."